

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang menjadi perhatian otoritas moneter yakni bank sentral. Pengendalian inflasi yang dilakukan menjadi tugas bagi bank sentral untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi sendiri mengandung arti peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan. Kenaikan harga tak bisa serta merta disebut sebagai inflasi apabila terjadi pada komoditas tertentu karena adanya faktor musiman yang merupakan dampak dari waktu menjelang hari-hari besar ataupun gangguan dari *supply and demand* yang tidak seperti biasanya (Utari, 2015).

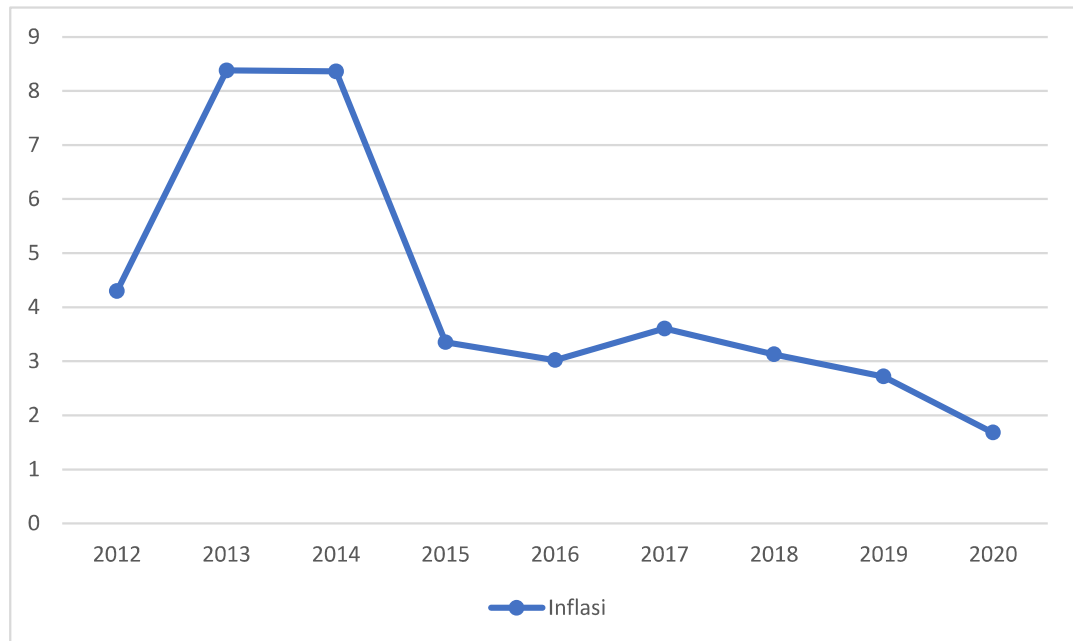
Pengendalian inflasi sangat penting dilakukan mengingat kestabilan inflasi menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi saling berkesinambungan dengan kesejahteraan masyarakat. Inflasi tinggi akan menurunkan pendapatan riil masyarakat kemudian akan menurunkan standar hidup, tingkat inflasi yang tinggi juga akan menimbulkan ketidakpastian untuk pelaku ekonomi dalam konsumsi, produksi maupun investasi yang berimbas kepada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi akibat munculnya tekanan *supply* yakni depresiasi nilai tukar, naiknya harga komoditas yang pemerintah sudah atur dan *negative supply shocks* karena terjadinya bencana alam ataupun gangguan pada kegiatan distribusi, sedangkan dari sisi *demand* akibat permintaan barang dan jasa yang tinggi terhadap persediaan yang ada dimana permintaan lebih besar dari kapasitas output yang tersedia. Selain itu dipengaruhi ekspetasi inflasi saat hari besar keagamaan dimana barang yang sebenarnya cukup untuk memenuhi permintaan namun harga barang dan jasa meningkat dari kondisi biasanya.

Teori yang dikatakan oleh Keynes mengartikan bahwa inflasi yang terjadi disebabkan oleh keinginan masyarakat yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kata lain beberapa masyarakat menginginkan hidup di luar batas kesanggupan ekonominya, karena keinginan yang berlebihan inilah yang akhirnya

permintaan akan barang bertambah sedangkan penawaran berada dalam kondisi tetap sehingga akan menyebabkan kenaikan harga (Setiowati, 2014).

Grafik 1. Pertumbuhan Inflasi Tahun 2012 – 2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Menurut data dari BPS, terjadi inflasi di tahun 2013 sebesar 8,38 persen dikarenakan kenaikan harga yang diperlihatkan oleh meningkatnya indeks beberapa kelompok pengeluaran, inflasi paling tinggi di tahun 2013 bulan Juli dengan kenaikan indeks paling tertinggi pada kategori transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 9,60 persen yang diikuti oleh kstegori bahan makanan sebesar 5,46 persen. Peningkatan inflasi tersebut sesuai dengan perkiraan dari Bank Indonesia dikarenakan adanya kensikan harga bensin dan akhirnya mnyebabkan peningkatan harga pada *administered prices* dan *volatile food*. Deflasi pada Januari tahun 2015 dikarenakan terjadi penurunan harga yang diperlihatkan oleh menurunnya indeks kelompok pengeluaran, pada bulan ini juga beriringan dengan adanya penurunan harga bahan bakar sehingga tingkat inflasi tahunan dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sampai ke angka 3,35 persen.

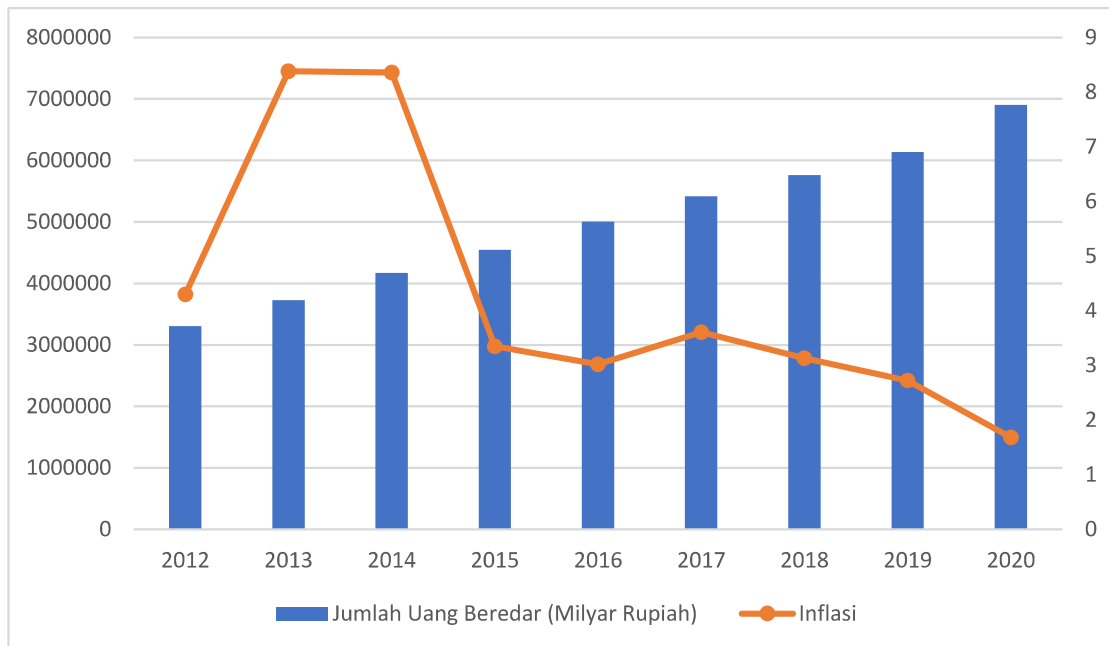
Pada Tahun 2017, inflasi bulanan paling tinggi terjadi di bulan januari yang disebabkan adanya kenaikan harga dalam indeks kelompok pengeluaran tertinggi yakni kategori transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,35 persen kemudian disusul oleh kategori perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar

1,09, hal ini juga beriringan dengan adanya penetapan kebijakan baru mengenai penggunaan uang elektronik di jalan tol. Menurut situs resmi dari Kementerian PUPR, transaksi non tunai mulai di uji coba pada jalan tol di tahun 2017 dengan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dan berkewajiban menggunakan *e-money* pada 31 Oktober 2017. Pada tahun 2018 terjadi deflasi pada bulan September dikarenakan turunnya indeks kelompok pada bahan makanan sebesar 1,62 persen sementara kelompok lain mengalami peningkatan sementara pada tahun 2019 dan 2020 masih terdampak pandemic yang membuat pendapatan riil masyarakat menurun dan memengaruhi permintaan.

Inflasi yang tinggi terjadi pada tahun 2013 sampai 2014. Menurut catatan publikasi Rakornas TPID IV Tahun 2013, kenaikan inflasi dapat disebabkan karena adanya harga bensin yang naik disusul dengan naiknya harga pada bahan makanan sehingga melampaui sasaran inflasi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 66/PMK.011/2012 tentang sasaran inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015, sasaran inflasi yang ditetapkan sebesar 4,5 persen untuk tahun 2013 dan 2014 serta 4 persen untuk tahun 2015. Berdasarkan data yang ada, tingkat inflasi pada tahun 2013 dan 2014 kenyataannya melampaui sasaran inflasi yang telah ditetapkan karena inflasi menyentuh angka 8 persen.

Menurut teori kuantitas oleh Irving Fisher, tingkat harga ditentukan oleh keberadaan jumlah uang beredar, hal ini berada pada kondisi dimana ketika penawaran uang bertambah maka tingkat harga umum akan ikut meningkat (Ambarini, 2017).

Grafik 2. Jumlah Uang Beredar (Milyar Rupiah) dan Pertumbuhan Inflasi Tahun 2012 – 2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Jumlah Uang Beredar ialah seluruh jenis uang yang beredar di dalam kegiatan ekonomi atau yang ada di tangan masyarakat dan ini diedarkan oleh Bank Indonesia (Haryati, 2014). Uang memiliki dua pengertian yakni Uang beredar dalam arti sempit (M1) dan Uang beredar dalam arti luas (M2). Uang beredar dalam arti sempit terdiri atas uang kartal dan uang giral, sedangkan uang beredar dalam arti luas (M2) terdiri atas M1 ditambah dengan uang kuasi yakni deposito berjangka dan saldo tabungan masyarakat. (Ambarini, 2017)

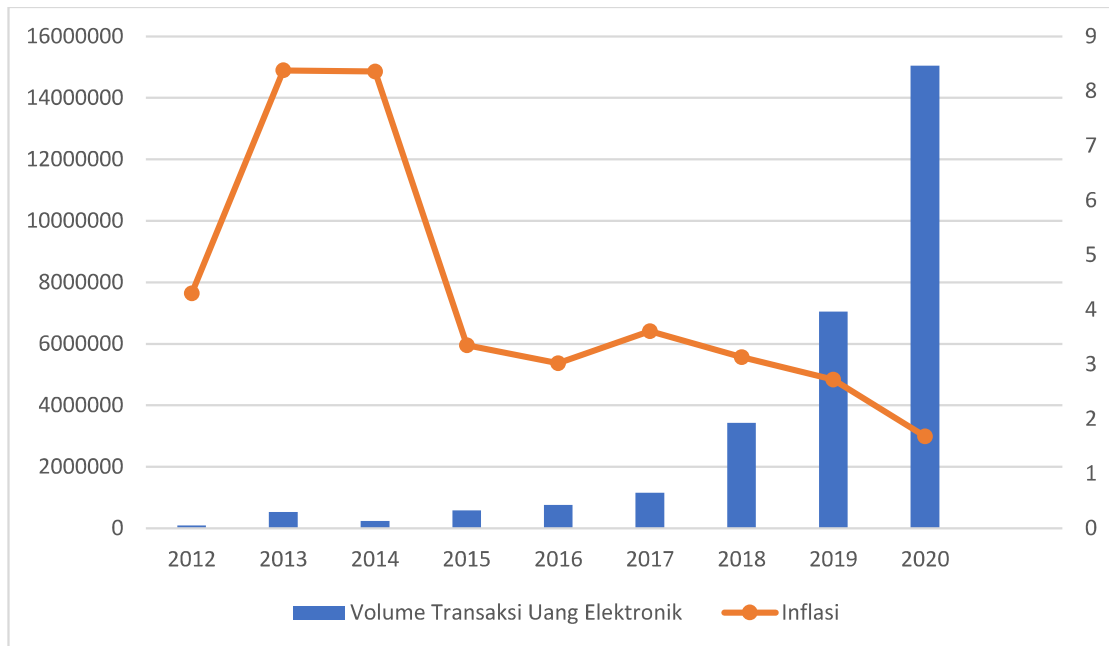
Data di atas memperlihatkan pergerakan JUB tiap tahun mengalami peningkatan. Menurut laporan yang diluncurkan Bank Indonesia mengenai analisis uang beredar M2 pada desember tahun 2013, pertumbuhan jumlah uang beredar terlihat stabil dibanding bulan sebelumnya. Perkembangan pertumbuhan M2 ini dipengaruhi oleh naiknya simpanan masyarakat di bank yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan suku bunga simpanan berjangka. Pada tahun 2015, M2 tumbuh melambat yang bersumber dari pelambatan pertumbuhan uang kuasi yang dipengaruhi oleh lambatnya tagihan bersih pada Pemerintah Pusat. Hal ini selaras dengan naiknya simpanan Pemerintah di BI terkait dengan terbitnya *global bond*

sebesar 3,5 juta USD yang dilakukan pemerintah untuk *prefunding* APBN 2016. Pada desember tahun 2017, terjadi pelambatan pertumbuhan M2 yang dipengaruhi oleh keuangan Pemerintah Pusat. Bulan desember 2018 terjadi pula pelambatan pertumbuhan M2 yang dipengaruhi penurunan aktiva luar negeri bersih dan melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Walaupun terjadi pelambatan namun pertumbuhan uang beredar selalu meningkat dan stabil.

Ketika volume JUB naik, inflasi pun ikut naik . Hal ini serasi dengan teori yang diungkapkan oleh Irving Fisher dalam teori kuantitas uang. Oleh sebab itu terdapat hubungan yang lurus antara JUB dengan inflasi (Haryati, 2014). Berdasarkan data, JUB terus mengalami kenaikan sampai tahun 2020, namun inflasi terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan teori kuantitas tersebut, terdapat perbedaan antara data dengan teori yang ada yakni uang beredar yang semakin meningkat sedangkan tingkat inflasi terus mengalami penurunan.

Inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, adapula uang elektronik yang menjadi bagian dalam sistem pembayaran non tunai. Penggunaan uang elektronik yang semakin marak digunakan sangat mempermudah transaksi masyarakat. Penggunaan transaksi non tunai ini akan memberi efek substitusi. Hal itu akan menurunkan permintaan uang kartal dan meningkatnya M1 serta M2 yang akan memengaruhi harga sehingga harga ikut meningkat (Yuwono, 2017). Penggunaannya juga kini semakin gencar diberlakukan pemerintah untuk mendukung adanya GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Berikut perbandingan antara transaksi uang elektronik dengan tingkat inflasi.

Grafik 3. Volume Transaksi Uang Elektronik (Ribu Transaksi) dan Pertumbuhan Inflasi Tahun 2012 – 2020 (Persen)



Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2021

Definisi *e-money* menurut Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang berbentuk kartu dengan chip di dalamnya, kartu ini berupa saldo yang harus di top up ketika akan bertansaksi. Menurut pengertian inilah, uang elektronik dikategorikan sebagai uang giral yang dapat dipergunakan secara langsung untuk transaksi karena uang giral sendiri memiliki pengertian yaitu uang yang ada di dalam rekening giro di bank umum yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Masyarakat dapat menggunakan uang giral dan uang kartal untuk pembayaran secara langsung dikarenakan lebih likuid dibanding uang kuasi (Suseno, 2002). Sebagian besar bank di Indonesia memiliki layanan uang elektronik, seperti Mandiri yang punya *e-money*, Brizzi milik BRI, BNI dengan Tapcash, dan BCA yang memiliki Flazz. Bahkan sekarang pun *startup* seperti Gojek memiliki alat pembayaran yang menggunakan dompet digital yakni Gopay, Shopee dengan ShopeePay, atau Tokopedia dengan Tokocash (Fadlillah, 2018).

Pada grafik di atas, transaksi uang elektronik setiap tahun cenderung meningkat. Menurut situs resmi Transjakarta, pada tahun 2013 penggunaan uang elektronik sudah diberlakukan sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan perjalanan dengan jumlah volume satuan transaksi sebanyak 12.442.672 transaksi

Angelica Putri Wijaya, 2022

PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, PEMBAYARAN NON TUNAI DAN BI RATE TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

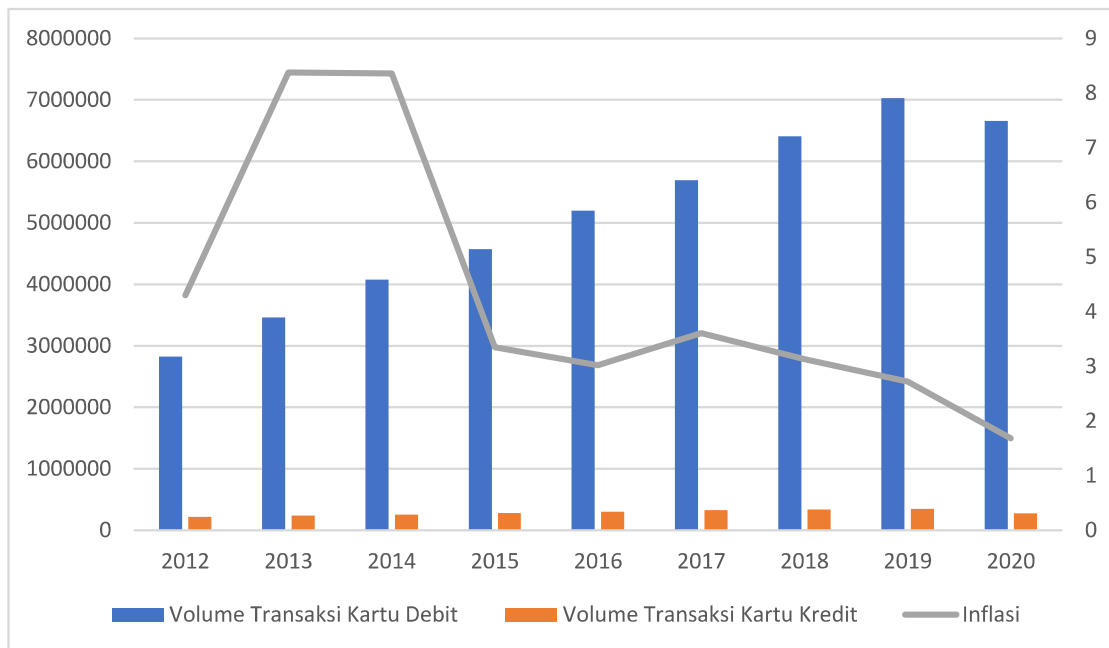
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang kemudian disusul pemberlakuan penggunaan uang elektronik di jalan tol pada tahun 2017 sebanyak 163.301.280 transaksi, hal ini disampaikan dalam situs resmi Kementerian PUPR, transaksi non tunai mulai diuji cobakan di jalan tol pada tahun 2017 dengan uang elektronik (*e-money*) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai yang telah disepakati antara Bank Indonesia dengan Kementerian PUPR sebagai bentuk modernisasi pembayaran tol untuk efektifitas dan efisiensi, sehingga dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, penggunaan uang elektronik melonjak sampai pada tingkat tertinggi tahun 2019 sebanyak 515.195.069 transaksi karena penggunaan *e-money* yang sudah bisa dipergunakan untuk beragam jenis transaksi, hal ini juga sejalan dengan diberlakukannya penggunaan *e-money* untuk transportasi KRL sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2020 pada masa awal terjadi pandemi Covid-19 yang hanya sebanyak 438.047.792 transaksi (Damayanti, 2020).

Korelasi yang terjadi antara uang elektronik dan kecepatan perputaran uang memperlihatkan hubungan yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Priyatama dan Apriansah (2010) yakni penambahan penggunaan *e-money* berdampak pada meningkatnya perputaran uang. Kehadiran *e-money* memacu masyarakat menjadi lebih konsumtif dengan sentuhan teknologi dan memengaruhi gaya hidup masyarakat. Konsumsi yang terus meningkat akan menyebabkan kenaikan inflasi (Zunaitin, 2017). Tingginya penggunaan uang elektronik ini yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan inflasi. Namun kenyataannya peningkatan penggunaan uang elektronik ini tidak sesuai dengan tingkat inflasi yang justru memperlihatkan penurunan.

Membahas tentang pemakaian uang elektronik, penggunaan kartu debit dan kartu kredit sudah lebih dahulu digunakan untuk bertransaksi, berikut grafik yang menunjukkan penggunaan kartu debit dan kredit masyarakat

Grafik 4. Volume Transaksi Kartu Debit (Ribu Transaksi), Kartu Kredit (Ribu Transaksi) dan Pertumbuhan Inflasi (Persen) Tahun 2012 – 2020



Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2021

Menurut pengertian BI, APMK merupakan alat bayar berbentuk kartu yang terdiri dari kartu kredit dan kartu ATM/Debit. Kartu kredit merupakan APMK yang dipakai untuk kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi yang hendak dilakukan, termasuk pembelian atau tarikan tunai, dimana kewajiban pemilik kartu untuk melakukan pembayaran terlebih dulu dipenuhi oleh penerbit kartu dan pemilik kartu wajib membayar kewajiban tersebut pada waktu yang sudah sesuai dengan kesepakatan dengan cara pelunasan langsung atau angsuran, sedangkan kartu debit/ATM merupakan APMK yang dipakai untuk menarik dana atau simpanan dengan cara mengurangi simpanan secara langsung.

Menurut buku kebanksentralan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tabungan yang ditawarkan oleh bank merupakan tabungan yang dapat digunakan atau ditarik kapanpun jika dibutuhkan. Perkembangan teknologi saat ini menciptakan produk-produk baru dalam perbankan seperti uang elektronik, kartu debit, kartu kredit dan internet banking. Kartu ATM/debit memiliki sifat yang sama dari tabungan, dengan kata lain simpanan ini serupa dengan giral yang hampir sama dengan uang tunai sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang berada di tabungan dan transaksi menggunakan kartu ATM/debit digolongkan ke dalam uang giral

Angelica Putri Wijaya, 2022

PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, PEMBAYARAN NON TUNAI DAN BI RATE TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

karena dapat dijadikan sebagai alat pembayaran secara langsung dengan mende-bit saldo yang ada ditabungan. Kartu kredit juga sama halnya dengan kartu ATM/debit, penggunaannya dapat dilakukan secara langsung dengan kewajiban pembayaran terlebih dahulu yang dipenuhi oleh penerbit, dengan demikian pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung ini termasuk ke dalam uang M1 karena bersifat likuid. Hal ini menunjukkan bahwa kartu ATM/debit dan kartu kredit termasuk dalam M1 (Suseno, 2002).

Faktor yang menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat bukan hanya dari pendapatan saja namun perkembangan teknologi pun juga dapat menjadi faktor lain yang memicu terjadinya peningkatan konsumsi yakni ditunjukkan dengan tren pembayaran menggunakan kartu yang sudah menjadi kebiasaan diberbagai kalangan. Karena kemudahan yang didapatkan, APMK sekarang ini menjadi pilihan yang efisien dalam bertransaksi karena digunakan hampir seluruh kalangan masyarakat (Trisan, 2022).

Sejak tahun 2006, Bank Indonesia mempunyai program dalam peningkatan sistem pembayaran non tunai dengan mengembangkan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Program ini bertujuan untuk menekan jumlah uang dalam peredarannya di masyarakat serta mendorong adanya sistem pembayaran yang lebih efektif, aman dan efisien bagi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, juga menekan biaya uang yang akan dicetak untuk beredar di masyarakat (Munte, 2017)

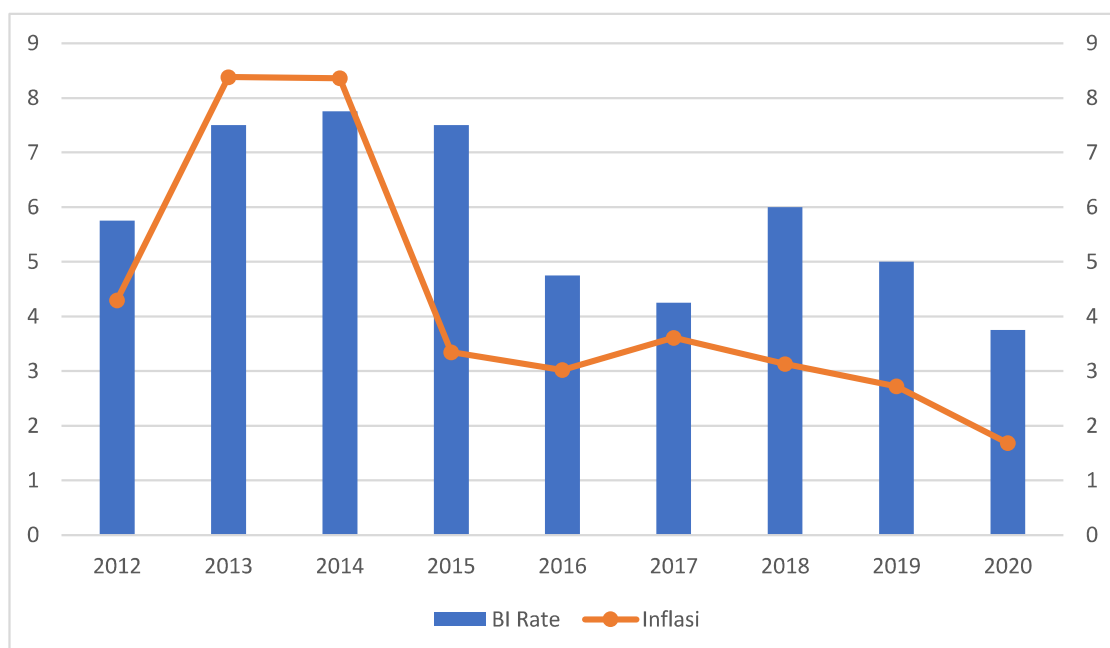
Pada grafik di atas memperlihatkan bahwa pembayaran non tunai semakin disukai masyarakat yang di lihat dari volume transaksi yang terus mengalami peningkatan. (Sutrisna, 2022). Penggunaan Kartu ATM/debit lebih tinggi dari pada penggunaan kartu kredit. Mengingat penggunaan kartu ATM ini lebih sering dipakai masyarakat untuk menerima upah melalui transfer hingga transaksi yang dilakukan baik secara offline maupun online ataupun melakukan pembayaran tagihan. Berbeda dengan penggunaan kartu kredit yang penggunaannya hanya dapat dilakukan kalangan tertentu sesuai dengan syarat pemberian kredit. (Fatmawati, 2019)

Pada grafik di atas, penggunaan kartu debit mengalami kenaikan setiap tahun mulai dari tahun 2019 sebanyak 616.926.599 transaksi dan pada tahun 2020 tetap

mengalami peningkatan sebanyak 639.033.670 transaksi yang berbeda dengan transaksi kartu kredit dimana cenderung bertambah setiap tahunnya namun akhirnya turun drastis pada tahun 2020 sebesar 23.595.782 yang sebelumnya pada tahun 2019 menyentuh angka 32.725.116. Kondisi saat itu ketika pandemi hampir melumpuhkan perekonomian masyarakat sehingga minat penggunaan kredit pun menurun.

Pembayaran menggunakan kartu hanya menggantikan JUB di masyarakat. Kenaikan volume transaksi kartu ATM/Debit bisa berdampak pada keadaan inflasi di Indonesia, dari hasil itu menunjukkan bahwa volume transaksi kartu ATM/Debit selaras dengan inflasi (Trisan, 2022). Transaksi non tunai mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap JUB yang berarti memiliki kaitan yang potensial terhadap inflasi (Fatmawati, 2019). Sesuai dengan data yang ada, penggunaan APMK baik kredit maupun debit terlihat mengalami peningkatan namun berbeda dengan tingkat inflasi yang semakin menurun di tahun 2018 seharusnya peningkatan volume penggunaan APMK ini bergerak lurus sama dengan pertumbuhan inflasi.

Grafik 5. BI Rate (Persen) dan Pertumbuhan Inflasi Tahun 2012–2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Menurut Bank Indonesia, BI Rate di definisikan sebagai suku bunga kebijakan dengan memperlihatkan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh BI serta diberitahukan kepada masyarakat. BI Rate sendiri akan diberitahukan oleh Dewan Gubernur BI setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan. Tingkat bunga menurut teori Keynes adalah peristiwa moneter yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, semakin tinggi tingkat bunga, rasa ingin memegang uang akan menurun, sebaliknya jika tingkat bunga turun maka permintaan uang akan meningkat. Untuk mengatasi naiknya harga barang, pemerintah menetapkan BI Rate guna mengendalikan laju inflasi yakni dengan cara membatasi peredaran uang. Untuk menekan inflasi tersebut maka peredaran uang akan ditekan dengan cara menaikkan BI Rate yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Ambarini, 2017). BI Rate merupakan sinyal untuk bank-bank dalam penentuan tingkat suku bunga seperti suku bunga deposito, kredit dan tabungan. Bila inflasi meningkat, BI akan memberi respon dengan menaikkan BI Rate (Bank Indonesia, 2016).

Pada tahun 2013, BI Rate terlihat meningkat sesuai dengan informasi dari situs resmi Kemenkeu, peningkatan BI Rate ini guna mengantisipasi inflasi akibat kenaikan BBM yang sebelumnya berada di angka 5,75 persen pada awal tahun 2013 hingga pada bulan juli saat pemberlakuan kenaikan BBM, BI Rate juga ikut meningkat ke angka 6,5 persen dan pada bulan selanjutnya naik secara bertahap sampai pada desember 2013 bertahan di 7,5 persen. Pada tahun 2016, BI Rate turun ke angka 4,75 pada bulan desember, hal ini menurut Kemenkeu dilakukan untuk menekan laju inflasi dan juga dikarenakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Untuk itu otoritas moneter Indonesia berupaya untuk menjaga perekonomian dengan menurunkan BI Rate yang dijadikan sebagai acuan dengan harapan akan meningkatkan permintaan domestik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut otoritas keuangan, Bank Indonesia, di kondisi melemahnya pertumbuhan ekonomi global, turunnya BI Rate diharap bisa mengoptimalkan upaya menstimulasi permintaan domestik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memelihara stabilitas makro ekonomi. Penurunan juga terjadi pada tahun 2017 yang terjadi terus menerus sampai pada tahun 2020 sehingga menjadi penurunan terendah yang menyentuh angka 3,75 persen pada desember 2020.

Kondisi ini tak lain disebabkan oleh pandemi yang terjadi dan mempengaruhi perekonomian. Kondisi perekonomian yang terpuruk di Indonesia mengharuskan beberapa kebijakan harus diubah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Bank Indonesia melakukan beberapa langkah untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional dan menjaga tingkat inflasi agar pada kondisi stabil. Menurut Bank Indonesia, dengan melakukan hal yang sama seperti tahun 2016 dimana BI Rate diturunkan, harapan pembuat kebijakan moneter sama dengan tahun sebelumnya yakni meningkatkan konsumsi dan permintaan masyarakat sehingga terjadi pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan kondisi perekonomian dan pengendalian inflasi, tingkat inflasi dan BI Rate memiliki hubungan berbanding lurus, ketika Inflasi meningkat maka BI Rate juga harus dinaikkan agar berada pada kondisi stabil, namun dari grafik yang ada terlihat bahwa tahun 2017 terjadi penurunan BI Rate namun tidak diikuti oleh penurunan inflasi. Hal ini terjadi perbedaan dengan data yang di dapat dimana ketika inflasi naik seharusnya BI Rate juga ikut meningkat untuk mengendalikan inflasi.

I.2 Perumusan Masalah

Inflasi merupakan masalah moneter yang tak bisa dihidari tapi dapat dikendalikan. Otoritas moneter selalu berupaya menekan tingkat inflasi guna menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Perekonomian dengan tingkat inflasi yang amat tinggi atau amat rendah dari sasaran yang telah ditetapkan tentunya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi pernah melampaui sasaran inflasi yang ditetapkan kemudian ditambah dengan adanya perkembangan teknologi yang menciptakan produk keuangan baru yang melengkapi keberadaan peredaran uang yakni penggunaan *cashless* dengan uang elektronik, kartu debit/ATM serta kartu kredit. Keberadaan perkembangan teknologi ini akan merubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dan melakukan konsumsi. Perilaku masyarakat yang konsumtif karena kemudahan yang didapat akan menjadi indikasi terjadinya inflasi. Begitupula dengan tingkat suku bunga yang akan berfluktuatif mengikuti pergerakan inflasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia.
- b. Bagaimana pengaruh Uang Elektronik Terhadap Inflasi di Indonesia.
- c. Bagaimana pengaruh APMK Terhadap Inflasi di Indonesia
- d. Bagaimana pengaruh BI Rate Terhadap Inflasi di Indonesia

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia
- b. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Uang Elektronik terhadap Inflasi di Indonesia
- c. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh APMK terhadap Inflasi di Indonesia.
- d. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan juga dapat memperoleh manfaat yakni :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi peneliti maupun pembaca dengan mengaplikasikan teori ekonomi sehingga akan menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pembayaran non tunai dan BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, diharapkan bisa menjadi referensi untuk menentukan dan mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan yang tepat berkaitan dengan pengendalian inflasi dan adanya penggunaan pembayaran non tunai di Indonesia sehingga dapat memaksimalkan penggunaannya.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan serta representasi bagaimanakah pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pembayaran non tunai dan BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia sehingga seluruh lapisan

masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mempermudah transaksi kedepannya.

- 3) Bagi peneliti, diharapkan memberikan wawasan pemikiran teoritis tentang variabel yang diteliti dan kaitannya terhadap perekonomian di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengimplementasian di bidang ilmu ekonomi.